

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN DALAM MENDISEMINASI NILAI-NILAI
ISLAM DI KABUPATEN BANJARNEGARA**



TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Sosial

IAIN PURWOKERTO

MUKHAMMAD WAKHIDDIN

NIM. 1617641008

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN DALAM MENDISEMINASI NILAI-NILAI ISLAM DI
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Mukhammad Wakhiddin
NIM. 1617641008

ABSTRAK

Di Kabupaten Banjarnegara peredaran minuman beralkohol dinilai cukup tinggi dan oleh sebagian masyarakat menganggap hal tersebut dikhawatirkan akan dapat memicu tindak kejahatan. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamr atau Minuman Beralkohol, sanksi untuk pengedar masih dianggap ringan dan tidak membuat efek jera. Untuk itu, diperlukan adanya perubahan dalam regulasi tersebut melalui sistem politik yang di dalamnya terdapat infrastruktur politik dan suprastruktur politik.

PPP merupakan salah satu instrument dari infrastruktur politik, namun ia juga merupakan bagian dari suprasturktur politik dimana anggota partainya menjadi anggota dewan yang memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan. Adanya peran ganda tersebut, PPP memerlukan strategi komunikasi politik dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama baik dengan infrastruktur maupun suprastruktur politik sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi politik PPP dalam upaya mendiseminasi nilai-nilai Islam dengan suprastuktur dan infrastruktur politik di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini dilaksanakan di DPC PPP Kabupaten Banjarnegara dengan *key informan* anggota Dewan Fraksi PPP. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis kualitatif. Adapun analisisnya adalah model analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik PPP dengan suprastruktur politik diantaranya PPP mengkategorikan khalayak suprastruktur politik sebagai kelompok politik. Dalam menyusun pesan persuasif, PPP menggunakan konsep AIDDA. Selain itu dalam menerapkan metode penyampaian pesan, PPP menggunakan kombinasi antara metode *informatif*, *edukatif*, dan *cursive*. Sedangkan untuk penggunaan media, PPP dalam mengaplikasikan komunikasi politiknya tidak menggunakan media komunikasi akan tetapi lebih sering menerapkan komunikasi interpersonal atau komunikasi *face to face*.

Sedangkan untuk strategi komunikasi politik PPP dengan infrastruktur politik, PPP mengkategorikan khalayak infrastruktur politik sebagai kelompok sosial. Dalam menyusun pesan persuasifnya, PPP juga menggunakan konsep AIDDA yang kemudian menerapkan metode penyampaian pesannya dengan menggunakan kombinasi antara metode *Redudancy*, *Informatif*, *Persuasif*, *Edukatif*, dan *Cuersive*. Untuk penggunaan media komunikasi politik, PPP menerapkan hal yang sama seperti kepada suprastruktur politik yaitu tidak menggunakan media komunikasi akan tetapi lebih sering menerapkan komunikasi interpersonal.

Kata Kunci: strategi komunikasi politik, partai politik, PPP

THE POLITICAL COMMUNICATION STRATEGY OF PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN IN DISSEMINATING ISLAMIC VALUES IN BANJARNEGARA DISTRICT

Mukhammad Wakhiddin
NIM. 1617641008

ABSTRACT

In Banjarnegara Regency, the circulation of alcoholic drinks is considered quite high and some people think that it is feared that it will lead to crime. Whereas in the Banjarnegara Regional Regulation Number 8 of 2008 concerning Supervision and Control of Alcoholic Drinks or Drinks, the sanctions for dealers are still considered light and do not create a deterrent effect. For that, it is necessary to change the regulation through a political system in which there is a political infrastructure and a political superstructure.

PPP is one of the instruments of political infrastructure, but it is also part of the political suprastructure where members of the party are members of the board who have the authority to decide policies. With this dual role, PPP requires a political communication strategy in an effort to realize common interests both with infrastructure and the political superstructure as a form of actualization of Islamic values.

This study aims to determine and analyze the PPP political communication strategy in an effort to disseminate Islamic values with the political suprastructure and infrastructure in Banjarnegara Regency. This research was conducted at DPC PPP Banjarnegara Regency with key informants of members of the PPP Faction Council. The research method used is descriptive qualitative. The analysis is an interactive analysis model.

The results of this study indicate that the PPP political communication strategy with the political superstructure, including PPP, categorizes the political superstructure audience as a political group. In composing a persuasive message, PPP uses the AIDDA concept. In addition, in implementing the message delivery method, PPP uses a combination of informative, educative, and cursive methods. As for the use of media, PPP in applying its political communication does not use communication media but rather applies face to face communication.

As for the PPP political communication strategy with political infrastructure, PPP categorizes the political infrastructure audience as social groups. In compiling its persuasive message, PPP also uses the AIDDA concept which then applies the method of delivering its message by using a combination of Redundancy, Informative, Persuasive, Educative, and Cuersive methods. For the use of political communication media, PPP applies the same thing as to the political superstructure, namely not using communication media. but more often apply face to face communication.

Keywords: political communication strategy, political parties, PPP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II Strategi Komunikasi Politik PPP Dalam Mendiseminasi Nilai- Nilai Islam Di Kabupaten Banjarnegara	
A. Landasan Teori	
1. Strategi.....	14

2. Komunikasi Politik	16
3. Strategi Komunikasi Politik	24
4. Nilai-Nilai Islam.....	28
5. Partai politik Islam dalam memperjuangkan nilai-nilai islam ..	30
6. Kerangka Berfikir Penelitian.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
2. Tempat dan Waktu Penelitian	38
3. Subjek dan Objek Penelitian	38
4. Data dan Sumber Data	39
5. Teknik Pengumpulan Data	39
6. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PPP	44
1. Letak geografis	44
2. Sejarah berdirinya	45
3. Lambang, visi dan misi.....	51
4. Struktur organisasi	56
5. Program kerja.....	58

B. Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam dengan Suprastruktur dan Infrastruktur politik Di Kabupaten Banjarnegara	
--	--

1. Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan dengan Suprastruktur politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara	62
a. Memahami Khalayak	62
b. Menyusun Pesan Persuasif	69
c. Metode	74
d. Memilah dan memilih Media	77
2. Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan dengan Infrastruktur politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara	81
a. Memahami Khalayak	81
b. Menyusun Pesan Persuasif	88
c. Metode	95
d. Memilah dan Memilih Media	103
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	109
B. Saran	110
C. Kata Penutup	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam. Umat Islam merupakan manusia yang meyakini Islam sebagai agama dan kepercayaan. Agama Islam memiliki konsepsi keyakinan, tata-aturan, norma-norma atau etik yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh penganutnya secara konsekuen. Islam juga agama yang universal, keuniversalan ini dibuktikan dalam pokok ajarannya yang dapat dimplementasikan dalam sebuah aspek kehidupan manusia. Konsekuensi ini menjadi tugas setiap muslim untuk menyampaikan ajaran nilai-nilai Islam disetiap waktu, tempat dan bidang kegiatan manusia.

Islam diyakini sebagai agama yang sempurna, bukan saja karena tuntunannya yang serba mencakup seluruh segmen kehidupan manusia, tetapi juga memiliki aturan yang berfungsi mengontrol dan mengawasi bahkan memberi penghargaan dan sanksi. Oleh karena itu, selayaknya umat Islam mengamalkan ajaran agamanya dengan saksama dan konsisten demi mencapai kualitas hidup yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Kehadirannya memberikan arti dan sebagai penutup ketauhidan bagi agama sebelumnya untuk mengenali siapa Sang Khaliq sesungguhnya. Berkembangnya Islam sebagai ajaran *rahmatan lil 'alamin* menjadi konsekuensi untuk selalu berhadapan dengan zaman yang terus berubah. Karenanya, umat Islam selalu ditantang bagaimana mensintesakan keabadian wahyu dengan kesementaraan zaman.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam dunia Islam semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebagaimana contoh kasus anti umat Islam Rohingnya oleh kaum Budha yang di promotori oleh biksu Wirathu yang di kenal dengan “Gerakan 969”, perang antara Israel dan palestina dan kebijakan dilarang memakai hijab di beberapa` kawasan Negara barat. Di Indonesia sendiri, dalam dua tahun terakhir aksi teror bom bunuh diri juga terjadi secara masif yang mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil. Adanya serangan bom bunuh diri tersebut mengakibatkan munculnya Islam phobia bagi umat diluar muslim

bahkan bagi muslim itu sendiri. Maka dari itu permasalahan umat Islam tidak akan selesai hanya dengan cara berdakwah secara tradisional yang masih kuat melekat pada masyarakat secara umum. Tentunya ini merupakan wacana serius dalam salah satu kajian aktifitas dakwah sebagai wujud mendiseminasi nilai-nilai Islam dalam bentuk *hablum minAllah dan hablum minannaas*.

Disisi lain, pada kenyataannya nilai-nilai ke-Islam-an tidak mungkin berkembang tanpa adanya dakwah, karena dalam kehidupan Rasulullah sarat dengan kegiatan dakwah. Demikian pula yang dikembangkan oleh para sahabat dan penerus beliau. Sebagaimana hal ini sudah ditegaskan oleh Allah sendiri melalui kitab suci-Nya, Al- Qur'an. Salah satunya adalah seperti tertuang dalam surat Ali Imran ayat 104.¹

Dakwah merupakan suatu keharusan dalam rangka mengemban agama dan mengembangkan nilai – nilai Islam, aktivitas dakwah yang maju akan membawa pengaruh terhadap kemajuan agama. Sebaliknya aktivitas dakwah yang lesu akan berakibat pada kemunduran agama. Maka dapat dimengerti jika Islam meletakkan kewajiban dakwah pada setiap pemeluknya. Kemajuan dan kemunduran ummat Islam sangat berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya.

Aktivitas dakwah sendiri merupakan sebagai suatu proses usaha kerjasama untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya menyangkut segi-segi atau bidang yang sangat luas. Ia memasuki seegenap lapangan kehidupan manusia seperti pendidikan, social, ekonomi, budaya, dan tidak terkecuali di bidang politik.

Politik hendaknya dijadikan sebagai sarana yang efektif dalam usaha aktualisasi nilai-nilai Islam, baik dalam kehidupan politik itu sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Jalaludin Rakhmat dalam Islam aktual menggambarkan tentang perjuangan dakwah yang juga harus digerakkan dengan kekuatan politik.² Hal inilah yang bisa dikatakan jarang disentuh oleh para

¹ “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

² Hal yang senada juga diungkapkan Abdul basit, bahwa dakwah tidak akan berkembang manakala tidak memanfaatkan politik. Demikian juga politik tidaka akan menjadi

individu atau aktivis dakwah sebagaimana permasalahan yang sedikit diungkapkan sebelumnya.

Tindakan umat Islam dalam gerakan politik adalah sebuah keharusan karena perubahan tidak terletak pada teks al-Quran, namun terletak pada tindakan kita. Kekuatan politik merupakan kekuatan yang efektif sebagai upaya menegakkan kebenaran, maka seyogyanya keterlibatan anggota politik, partai politik maupun simpatisan yang membawa nama agama khususnya agama Islam adalah usaha melakukan dakwah dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Islam dalam realitas kehidupan di masyarakat. Walaupun realitasnya kini kerap berbalik, karena banyak orang maupun organisasi partai politik yang mengatasnamakan agama terbawa dalam putaran politik kekuasaan menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang kemurnian perjuangan mereka. Selain itu, sebagai seorang maupun lembaga politik yang membawa nama agama yang suci, seakan ternoda oleh permainan politik itu sendiri yang lebih berorientasi pada kekuasaan dan materialistis dengan melakukan berbagai cara termasuk jika harus menggunakan dalil-dalil agama. Jika benar itu terjadi pada partai politik yang membawa nama agama Islam tentu akan membahayakan masyarakat, karena dalam bahasa Munir Mulkan bisa dikatakan telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah.

Tahun 2018 dan 2019 merupakan moment tahun politik dimana PEMILU diadakan secara serentak. Tahun 2018 sebanyak 171 daerah mengadakan PILKADA pada 27 Juni 2018. Sedangkan pada 2019 masyarakat akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten juga memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Adanya momentum tersebut, setiap partai politik baik elite politik maupun kadernya melakukan pertemuan dengan sesama partai politik dan masyarakat. Pertemuan disini tidak lepas dari terciptanya komunikasi politik. Komunikasi politik memungkinkan elite politik menyediakan ruang publik untuk berkomunikasi dan saling menjajaki peluang-peluang yang memungkinkan mereka bertemu dan membicarakan masalah-masalah penting yang sedang

dihadapi serta memungkinkan mereka bersepakat melakukan hal-hal yang strategis di waktu ini maupun yang akan datang.

Setiap momentum komunikasi politik dapat dibaca konteksnya, karena dengan memahami konteksnya orang akan lebih memahami makna teks yang ada dalam konteks komunikasi politik itu.³ Sebagaimana contoh fenomena pertemuan elite partai politik antara Jokowi dan Prabowo dengan salah satu agendanya menunggang kuda di Hambalang, Bogor. Dalam pertemuan tersebut membahas persoalan kebangsaan, namun disisi lain dapat juga diartikan sebagai salah satu upaya menstabilkan tensi politik pasca PILPRES 2014. Dalam ranah kajian komunikasi politik, hal tersebut lazim disebut ZOPA (*Zone of Possible Agreement*), yaitu membuka area komunikasi yang lebih fleksibel untuk memperoleh kesepakatan yang bisa menjadi landasan kesepakatan bersama di masa mendatang.⁴

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Terminologi partai politik dalam ruang keilmuan sangat banyak dan beragam. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik- (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁶

³ Burhan Bungin, *Komunikasi Politik Pencitraan* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 175.

⁴ Gun Gun Heryanto, *Problematika Komunikasi Politik: Bingkai Politik Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal. 38.

⁵ UU NOMOR 2 TAHUN 2011 Tentang Partai Politik Pasal 1

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hal. 404.

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas,⁷ dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi.

Salah satu partai politik yang berasaskan agama adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berasaskan Islam.⁸ Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, partai ini merupakan hasil gabungan dari empat (4) partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah.⁹

Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridla Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.¹⁰

Pada pemilu tahun 2014 yang diikuti oleh 12 partai politik termasuk PPP yang juga ikut andil didalamnya, PPP mendapatkan kursi di DPR RI sebanyak 39 kursi dari 560 kursi yang ada. Perolehan tersebut bertambah 2 kursi dari hasil pemilu 2009. Dengan demikian, sejak berdirinya PPP, masyarakat Indonesia menerima kehadirannya sebagai partai yang dipercaya untuk membawa Indonesia kearah yang lebih baik lagi.

⁷ Ideologi partai politik sangat beragam, diantaranya ideologi nasionalis, sosialis, komunis, demokrat, pancasila, dll. Begitu juga dengan asas maupun basisnya, diantaranya yaitu bersas dan berbasis agama, etnis kedaerahan, profesi, programatik, dan lain sebagainya. Feith dan Castle mengelompokan aliran politik di Indonesia selama rentang 1945-1965 ke dalam lima arus utama, yaitu: 1) Nasionalisme Radikal; 2) Tradisionisme Jawa; 3) Islam; 4) Sosialisme demokratik; dan 5) Komunis. Ridho Al- Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori dan Praktek di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 9.

⁸ Anggaran Dasar PPP pasal 2. Dengan berasaskan Islam maka PPP masuk dalam kategori partai politik Islam dimana ia harus memperjuangkan nilai-nilai Islam. Lengkapnya lihat Ridho Al- Hamdi, *Partai Politik Islam ...* hal. 9.

⁹ Muqadimmah Anggaran Dasar PPP

¹⁰ Anggaran Dasar PPP pasal 5

Pada PEMILU PILEG (Pilihan Legislatif) tahun 2009 dan tahun 2014, khususnya di Kabupaten Banjarnegara PPP menunjukkan kekuatan kesolidannya dengan mendapatkan kursi dengan jumlah yang sama di DPRD, yaitu sebanyak 6 kursi dari 45 kursi. Partai politik lain seperti PKB mendapat 5 kursi, PKS 5 kursi, PAN 6 kursi, PDI P 6 kursi, GERINDRA 5 kursi, DEMOKRAT 3 kursi, GOLKAR 6 kursi, dan NASDEM 3 kursi.¹¹Sedangkan dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) pada tahun 2017, parpol PPP yang berkoalisi dengan parpol Demokrat dan parpol GOLKAR berhasil mengusung dan menghantarkan Budhi Sarwono sebagai Bupati Banjarnegara dan Syamsudin sebagai wakilnya. Hal ini juga membuktikan bahwa komunikasi politik PPP dengan partai lain dan masyarakat dalam hal memilih kepala daerah mencapai tujuannya.

Dalam perhelatan PEMILU tahun 2019, Kabupaten Banjarnegara menambah kursi DPRD yang semula 45 menjadi 50 kursi. Meskipun ada penambahan jumlah kursi, Perolehan kursi PPP mengalami penurunan 1 kursi. Adapun perolehan dari semua partai sebagai berikut, : PDI-P 9 kursi, PKB 7 kursi, PKS 5 kursi, NASDEM 4 kursi, PAN 4 kursi, GERINDRA 3 kursi, DEMOKRAT 7 kursi, HANURA 2 kursi, PPP 5 kursi, dan GOLKAR 4 kursi.

Terlepas dari hasil perolehan PEMILU, gerakan DPC PPP Kabupaten Banjarnegara dalam upaya mendiseminasi nilai-nilai Islam juga dilakukan secara berkesinambungan di beberapa wilayah, salah satunya adalah pengajian rutin di desa Kambangwangi kecamatan Wanadadi yang dilakukan setiap bulan sekali. Adapun pengisi acara dalam pengajian tersebut adalah pengurus DPC PPP Kabupaten Banjarnegara.

Kabupaten Banjarnegara sendiri mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.000.025 jiwa. Sebanyak 993.254 jiwa menganut agama Islam.¹²Kabupaten yang dijuluki kota “Es Dawet Ayu” ini juga memiliki 5 organisasi masyarakat Islam yang selalu aktif dalam menjalankan roda organisasinya, diantaranya Syarikat

¹¹ Data diolah dari laman <http://kpu-banjarnegarakab.go.id> diakses 4 Mei 2018 pukul 10.59 WIB

¹²<https://jateng.bps.go.id/statictable/2016/08/19/1272/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-tengah-2015.html> diakses 7 Mei 2018 pukul 12.34 WIB

Islam (SI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Tafsir AlQur'an (MTA), dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).¹³ Meskipun demikian, pada kenyataannya, maraknya kasus peredaran minuman keras di Kabupaten Banjarnegara membuat sebagian masyarakat khawatir menjadi salah satu pemicu tindak kejahatan. Pada bulan April 2018, Kejaksaan Negeri Banjarnegara telah memusnahkan sebanyak 2.292 botol minuman keras (miras) dari satu kasus.¹⁴ Di tahun yang sama pada bulan Mei, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara juga memusnahkan minuman keras hasil operasi sepanjang tahun 2017 hingga 2018 sebanyak 1.465 botol dan 232 botol cium kemasan.¹⁵

Minuman Keras/ beralkohol sudah dipastikan dilarang oleh agama Islam. Maka menjahui minuman ini guna menyelamatkan kehidupan generasi muda dan bangsa adalah suatu keniscayaan. Di Kabupaten Banjarnegara sendiri sudah diatur dalam Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamr atau Minuman Beralkohol. Namun sanksi atas pengedar masih dianggap ringan dan tidak membuat efek jera yakni hanya mendapatkan kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling tinggi lima puluh juta rupiah (Rp. 50.000.000,00).¹⁶ Hal ini tentunya diperlukan kajian ulang atas perda tersebut melalui para legislatif yang diusung oleh partai politik, terutama partai politik yang membawa nama agama Islam untuk lebih memperjuangkan demi tegaknya nilai-nilai Islam. Sedangkan organisasi masyarakat Islam yang ada secara *De Jure* memiliki kekuatan dalam menentukan arah regulasi, namun tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan.

PPP sebagai salah satu partai politik Islam yang mempunyai *legitimate power* memiliki fungsi juga sebagai bagian dari Infrastruktur politik. Namun

¹³Sumber kankemenag Kabupaten Banjarnegara.

¹⁴[http://www.seputarbanjar.com/2018/04/11/kejari-banjarnegara-musnahkan-2-292-botol-miras/diakses 31 Mei 2018 pukul 14.24 WIB](http://www.seputarbanjar.com/2018/04/11/kejari-banjarnegara-musnahkan-2-292-botol-miras/diakses%2031%20Mei%202018%20pukul%2014.24%20WIB)

¹⁵[https://satelitpost.com/beritautama/satpol-pp-banjarnegara-musnahkan-1-465-botol-miras diakses 31 Mei 2018 pukul 14.46 WIB](https://satelitpost.com/beritautama/satpol-pp-banjarnegara-musnahkan-1-465-botol-miras/diakses%2031%20Mei%202018%20pukul%2014.46%20WIB)

¹⁶Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol Pasal 9 ayat 1

sebagai partai politik, dia juga memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan publik, karena anggota partai yang menjadi anggota dewan juga masuk menjadi suprastruktur politik dalam sistem politik. Dengan demikian PPP memiliki peran ganda yaitu, infrastruktur politik dan suprastruktur politik.

Adanya peran ganda tersebut, tentunya membutuhkan strategi komunikasi politik dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama baik dengan infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kepentingan bersama ini juga tentunya tidak lepas guna merubah dari keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi sekaligus sebagai upaya dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam.

Adanya fenomena tersebut dan perolehan suara partai secara lokal (kabupaten) ini menjadi alasan mengapa penelitian ini memilih PPP sebagai studi kasus penelitian tentang strategi komunikasi politik partai politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa disaat suara Partai yang tidak membawa nama agama cenderung naik dan partai yang membawa nama agama secara umum menurun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa stabil dengan mempertahankan perolehan legislatifnya seperti pada pemilu 2009 dan 2014.¹⁷ Berangkat dari fenomena diatas maka bagaimana strategi komunikasi partai politik yang membawa nama agama khususnya PPP dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas peneliti akan mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, : Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam dengan Suprastuktur dan Infrastruktur Politik Di Kabupaten Banjarnegara ?

¹⁷ Salah satu gagalnya partai politik Islam dalam memperjuangkan kepentingannya di negara yang menganut sistem demokrasi adalah minimnya perolehan kursi di parlemen. Manakala secara mayoritas kursi di parlemen diperoleh oleh partai politik Islam maka akan semakin memudahkan kepentingannya untuk segera terealisasi. Lengkapnya lihat dalam Warjio, *Gagalnya Partai Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 314.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam dengan Suprastuktur dan Infrastruktur Politik Di Kabupaten Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam, khususnya pada kajian komunikasi politik yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik oleh partai politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam.
- b. Menjadi sumber inspirasi dan rujukan tentang strategi komunikasi politik partai politik Islam dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi bagi siapa saja yang fokus dan peduli terhadap arah pengembangan dakwah, terutama melalui sarana politik.
- b. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi para pengurus dan kader partai politik Islam secara umum dan khususnya Partai Persatuan Pembangunan serta masyarakat luas dalam menyiarkan nilai-nilai Islam.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang komunikasi politik dan partai politik tidak dapat dipisahkan. Partai politik sebagai bagian dari sistem politik mempunyai kepentingan dalam memanfaatkan komunikasi politik sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, seperti kemenangan dalam setiap pemilu maupun untuk mempertahankan kekuasaan dan memperjuangkan kepentingannya. Guna mempertajam kajian tentang strategi komunikasi politik partai dalam pemilihan umum kiranya perlu mengemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tema tersebut di atas.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Katimin, Syukur Kholil dan Muhammad Husni Ritonga tentang Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) dalam Pemberdayaan Komunitas Muslim di Sumatera Utara.¹⁸ Hasil penelitian ini mengungkapkan, bahwa: Pertama, bentuk komunikasi internal yang menggunakan komunikasi bawah (*downward communication*) komunikasi ke bawah adalah komunikasi satu arah yang merupakan perintah untuk melakukan berbagai program dari DPP yang diturunkan ke DPW untuk diimplementasikan. Sedangkan bentuk komunikasi eksternal adalah program pemberdayaan masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan adalah Rumah Pintar, Rumah Sehat, *House of Concern*, *Home Alert* dan Respon Bencana, Rumah Keluarga Indonesia, Rumah Aspirasi, Rumah Konsultasi Syariah, dan ruang kuliah. Program-program ini adalah bentuk komunikasi politik PKS dalam pemberdayaan komunitas Muslim di Sumatera Utara. Kedua, media komunikasi politik PKS dalam memberdayakan komunitas Muslim menggunakan media cetak dan elektronik yang bersifat kooperatif. Terutama, PKS Sumut belum memiliki media massa sendiri seperti surat kabar, majalah, televisi dan radio. Terkait hal itu, PKS juga menggunakan fasilitas WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Ketiga, kendala internal yang dihadapi adalah komitmen para kader untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan motto “menghormati masyarakat”, sementara hambatan eksternal adalah munculnya partai politik baru dengan berbagai identitas, masih maraknya kegiatan politik uang membuat orang belum matang dalam politik. Keempat, PKS telah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat Sumatera Utara, khususnya komunitas Muslim bahwa PK Sejahtera adalah benar-benar orang yang berorientasi pada masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat.

Maya Elektriكا Puspitasari tentang Analisis Strategi Komunikasi Politik Melalui Media Baru (Studi Kualitatif Komunikasi Politik Faisal Basri dan Bien Benjamin, Calon Independen Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Melalui

¹⁸ Katimin, et.al., "Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemberdayaan Komunitas Muslim di Sumatera Utara," Online Jurnal of *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 7, No.05 (Mei, 2018), 19-27 (diakses 18 Juli 2018).

Media Sosial).¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faisal-Biem telah menyampaikan pesan secara berulang di media sosial dengan metode informatif dan edukatif, namun kurang persuasif. Secara garis besar, strategi komunikasi politik yang dilakukan cukup optimal terutama dalam membangun citra politik sebagai pemain baru di kancah perpolitikan. Elemen-elemen penting dalam pembentukan citra sudah saling terintegrasi dan dibangun secara bersamaan dalam strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem. Citra independen dan bersih yang dikomunikasikan melalui media sosial telah diwujudkan dengan sistem penggalangan donasi *online*. Pemeliharaan citra tersebut dilakukan dengan penciptaan hubungan, meski tergolong statis. Tidak hanya independensinya, dominasi media sosial pada strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem juga telah menambah warna baru bagi demokrasi dan juga menjadi pembelajaran politik terutama dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012. Meski peran media konvensional belum tergantikan, namun keberadaan media sosial dapat menjadi senjata pelengkap dalam berkomunikasi dan membentuk citra politik. Penelitian ini hanya fokus kepada pemaparan strategi komunikasi politik dan pembentukan citra.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Akhirul Aminullohtentang Strategi Komunikasi Politik Partai Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 (Studi tentang Penyikapan Partai PKS terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD) di Yogyakarta.²⁰ Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD tidak mempengaruhi sikap PKS dalam kebijakan partai. Kebijakan PKS berkaitan dengan strategi komunikasi politik tidak berbeda baik sebelum maupun sesudah perubahan Undang-undang

¹⁹Maya Elekrika Puspitasari, "Analisis Strategi Komunikasi Politik Melalui Media Baru (Studi Kualitatif Komunikasi Politik Faisal Basri dan Biem Benjamin, Calon Independen Gubernur & Wakil Gubernur Dki Jakarta, Melalui Media Sosial)", *Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), vii.

²⁰Akhirul Aminulloh, "Strategi Komunikasi Politik Partai Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 (Studi tentang Penyikapan Partai PKS terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD)" *Tesis*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), xiv.

pemilu ini. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan strategi komunikasi politik yang bercorak dakwah. Strategi pemenangan pemilu PKS selanjutnya di rencanakan dalam bentuk empat tahapan aksi; *pertama*, PKS mendengar; *kedua*, PKS mengajak; *ketiga*, PKS bicara; dan *keempat*, PKS menang. Keempat tahapan aksi ini diterapkan pada tahun pemenangan pemilu menjelang pemilu 2009. Dalam menjalankan empat tahapan aksi pemenangan pemilu tersebut, PKS menggunakan strategi komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Peran strategi komunikasi politik PKS yang diterapkan pada pemilu legislatif 2009 terkesan kurang berdampak signifikan pada perolehan suara partai. Suara PKS hanya naik sedikit, yaitu sebanyak tujuh kursi di DPRD Propinsi Yogyakarta, naik satu kursi dibanding pemilu 2004 yang hanya enam kursi.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba meneliti strategi komunikasi politik PPP dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam dengan suprastuktur dan infrastruktur politik di kabupaten Banjarnegara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan.

Bab *Pertama*, sebagai pembuka sekaligus sebagai pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, berisi tentang landasan teori yang terdiri dari komunikasi, komunikasi politik, unsur-unsur komunikasi politik, strategi komunikasi, dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu Penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

Bab *ketiga*, adalah bab yang akan menyajikan metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian ini meliputi Paradigma dan pendekatan Penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab *keempat* yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Deskripsi Profil DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjarnegara (Sejarah, asas, sifat dan Prinsip Perjuangan; Tujuan dan usaha; dan susunan

pengurus). Selanjutnya yaitu Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam Di Kabupaten Banjarnegara dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Bab *kelima* sebagai penutup dari keseluruhan tesis ini, yang meliputi Simpulan, implikasi dan Saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan dengan suprastruktur politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara

Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh PPP terhadap suprastruktur politik diantaranya yaitu sebelum melakukan komunikasi politik PPP harus memahami bagaimana khalayak yang akan dihadapi. Suprastruktur politik oleh PPP dikategorikan/dikelompokan sebagai kelompok politik. Sedangkan dalam menyusun pesan persuasif, PPP menggunakan konsep AIDDA.

Selain itu dalam menerapkan metode penyampaian pesannya PPP lebih sering menggunakan kombinasi antara metode *informatif*, *educatif*, dan *cursive*. Sedangkan untuk penggunaan media, PPP dalam menyalurkan komunikasi politiknya tidak menggunakan media komunikasi akan tetapi lebih sering menerapkan komunikasi *face to face*.

2. Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan dengan infrastruktur politik dalam mendiseminasi nilai-nilai Islam di Kabupaten Banjarnegara

PPP dalam melakukan strategi komunikasi politiknya kepada infrastruktur politik sebagai khalayak, PPP mengelompokan infrastruktur politik sebagai kelompok sosial. Untuk menyusun pesan persuasifnya kepada kelompok sosial ini PPP menggunakan cara yang sama dengan suprastruktur politik yaitu dengan menggunakan konsep AIDDA.

Adapun metode penyampaian pesannya, PPP juga melakukan kombinasi metode yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan metode yang diterapkan kepada suprastruktur politik, diantaranya yaitu metode

Redudancy, Informatif, Persuasif, Educatif, dan Cuersive. Sedangkan untuk penggunaan media komunikasi politiknya, PPP menerapkan hal yang sama seperti kepada suprastruktur politik yaitu tidak menggunakan media komunikasi akan tetapi lebih sering menerapkan komunikasi interpersonal atau komunikasi *face to face*.

B. Saran

1. Pembaca

Penelitian ini masih banyak memiliki kelemahan dan kekurangan dalam berbagai segi. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya penelitian lain di masa yang akan datang terkait Islam dan politik. Peneliti menyadari kedepan pertarungan wacana tentang Islam dan politik akan berlanjut dan semakin marak, karena mengingat eksistensi partai politik Islam untuk pengembangan Islam masih perlu digali. Di sisi lain dalam kancan PEMILU, partai politik juga harus memenuhi ambang batas *parliamentary threshold*.

2. Partai Persatuan Pembangunan

Dalam melakukan strategi komunikasi politik, sebaiknya PPP juga menggunakan atau memanfaatkan fungsi media sebagai saluran dalam upaya mendiseminasi nilai-nilai Islam. Hal ini mengingat kecenderungan masyarakat secara umum dalam mengkonsumsi informasi melalui media, khususnya media digital. Dengan menggunakan media, diharapkan eksistensi partai politik Islam terhadap pengembangan Islam mempunyai rekam jejak yang dapat diketahui oleh masyarakat luas. hal ini sebagaimana harapan PPP yaitu sebagai wujud partai yang menjadi “Rumah Besar Umat Islam” yang seutuhnya dan sepenuhnya.

C. Kata Penutup

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala ni'mat dan rida yang diberikan kepada diri penulis, sehingga penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penulis juga menyadari betul bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat ketidak-sempurnaan (baik sisi penulisan maupun isi). Namun penulis

berharap, semoga hasil sederhana ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan Islam lainnya. Dan untuk dapat lebih menyempurnakan hasil karya tesis ini, penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun demi semakin menambah kematangan dan kesempurnaan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Al- Hamdi, Ridho. *Partai Politik Islam; Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Andrianus, Toni, dkk. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa, 2006
- Andrianus, Toni at.al. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa, 2006
- Ardial,. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks, 2010
- Arifin, Anwar. *Strategi Komunikasi*. Bandung: PT Amrico, 1984
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara, 2000
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Secretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK II, 2006
- Aziz, A. Ghafar. *Berpolitik Untuk Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000
- Basit, Abdul. *Filsafat Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- , *Wacana Dakwah Kontemporer*. Purwokerto: STAIN Press, 2005
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bungin, Burhan. *Komunikasi Politik Pencitraan*. Jakarta: Kencana, 2018
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, kebijakan publik dan ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Cangara, H. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007
- , *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- , *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Creswell, Jhon W. *Qualitatvie Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches*, 2nd Edition. California: Sage Publications, 2007. E-Book (diakses 30 Mei 2018)
- DeFleur, Melvin L et.al., *Fundamentals of Human Communication*. California: Mayfield Publishing Company, 1993.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Depdikbud. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990
- DeVito, Joseph A. *Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: Professional Books, 1997
- Effendy, Onong U. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004
- , *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.

- Heryanto, Gun Gun. *Problematika Komunikasi Politik: Bingkai Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018
- Imaroh, Muhammad. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, terj. Musthalah Mawfur. Jakarta: Robbani Press, 1998
- Iriantara, Yosol. *Manajemen Strategis Public Relation*. Jakarta : Ghalia, 2004
- Jasin, Johan. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2016
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1986
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006
- Kuntowijoyo,. *Identitas Politik Umat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018
- , *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1993
- Littlejohn, Stephen W and Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*. New Mexico: Wadsworth, Thomson Learning, 2005.
- Littlejohn, Stephen W. *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication*. Edisi terjemahan oleh Muhammad Yusuf Hamdan. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Maarif, Syarif. *Islam dan Politik; Upaya Membingkai Peradaban*. Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999
- Mar'at. *Sikap Manusia : Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Maulana, Herdian dan Gungum Gumelar. *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta : Akademia Permata, 2013
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Edisi terjemahan Jakarta: UI Press, 1992
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Morissan,. *Teori Komunikasi: Individu hingga Massa*. Jakarta: Kencana, 2013
- Muhtadi, Asep Saiful. *Komunikasi politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007
- Mulyana, Deddy. *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung : Rosdakarya, 2005
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

- Nurhasim, Moch. "Masa Depan Partai Islam Era Reformasi: Sebuah Perspektif Analisis" dalam Masa Depan Partai Islam Di Indonesia, ed. Moch. Nurhasim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Pawito,. Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Penyusun, Tim. Kamus Besar Bahasa Indonesia. ed. Ke-3. Jakarta : Balai Pustaka, 2001
- Plano, Jack C dkk,. Kamus Analisa Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994
- Raliby, Osman. Kamus International. Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- Salim, Abdul Muin. Fiqih Siyasaah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Alqur'an. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sumadiria, Haris. Sosiologi Komunikasi Massa. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014
- Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 1992
- Sutopo. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press, 2006
- Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. ed. Ke-3. Jakarta : Balai Pustaka, 2001
- Wahyudin, Uud. "Komunikasi Politik dan Budaya Diplomasi" dalam Komunikasi Kontekstual; Teori dan Praktek Komunikasi Kontemporer, ed. Atwar. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Warjio,. Gagalnya Partai Politik Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Widjaja,. H.A.W. Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Yarger, Harry R. Strategic Theory For The 21st Century: The Little Book On Big Strategy. United States: Strategy Studies Institut, 2006

REFRENSI LAINNYA

Ali, Ibis. Proses Terbentuknya Pesan dalam Diri Kita, *Kompasiana*, Senin, 30 Januari 2012 (diakses 5 Desember 2020)

Anggaran Dasar PPP

<http://kpu-banjarnegarakab.go.id> diakses 4 Mei 2018 pukul 10.59 WIB

<http://www.seputarbanjar.com/2018/04/11/kejari-banjarnegara-musnahkan-2-292-botol-miras/> diakses 31 Mei 2018 pukul 14.24 WIB

<https://jateng.bps.go.id/statictable/2016/08/19/1272/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-tengah-2015.html> diakses 7 Mei 2018 pukul 12.34 WIB

<https://satelitpost.com/beritautama/satpol-pp-banjarnegara-musnahkan-1-465-botol-miras> diakses 31 Mei 2018 pukul 14.46 WIB

Nickols, Fred. *Strategy: Definitions & Meaning*, 2016
https://www.nickols.us/strategy_definitions.pdf

Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol

Ruli Nasrullah,. "*Riset Khalyak Digital Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual di Media Sosial*", JurnalSosioteknologi, Vol.17 No.2 (Agustus 2018) (diakses 8 Desember 2020)

UU NOMOR 2 TAHUN 2011 tentang Partai Politik

Widodo, Suko at.al., *Persepsi Ekspektasi Khalayak Terhadap Program Televisi Siaran Lokal*, dalam Laporan Penelitian DIK Rutin Universitas Airlangga, Pusat Kajian Komunikasi Universitas Airlangga, Oktober 2014

www.ppp.or.id

